

**STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK
(STUDI KASUS 10 PENGUNJUNG EVENT *COSPLAY* JEJEPANGAN DI JAKARTA)**

Rizqy Suryasani, Ikhlasih Dalimoenthe

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta
rizqyrizqy.rizqyrizqy@gmail.com

Diterima Redaksi: 07-04-2025 | Selesai Direvisi: 26-04-2025 | Diterbitkan *Online*: 28-04-2025

Abstract

This study aims to analyze sexual harassment in Japanese-themed events, focusing on its impacts and prevention strategies. The method used is a qualitative approach, with informants selected through purposive sampling. Data were collected from 10 cosplay attendees and 5 event organizers. The findings indicate that the forms of sexual harassment experienced include inappropriate comments, non-consensual touching, and stalking. The implications of these findings highlight the need for collaboration between event organizers and participants to create a safe environment, as well as the importance of education on social interaction boundaries. The proposed prevention approach is based on Jürgen Habermas' theory of the public sphere and is expected to raise collective awareness in reducing cases of sexual harassment in public spaces.

Keywords: Strategy, Cosplay, Sexual Harassment, Japanese-themed Events.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelecehan seksual dalam event bertema Jepang, dengan fokus pada dampak dan strategi pencegahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan informan terpilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dari 10 pengunjung cosplay dan 5 penyelenggara event. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi mencakup komentar tidak pantas, sentuhan tanpa izin, dan stalking. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya kolaborasi antara penyelenggara dan peserta event untuk menciptakan lingkungan yang aman, serta pentingnya edukasi tentang batasan interaksi sosial. Pendekatan pencegahan diusulkan berdasarkan teori ruang publik Jürgen Habermas dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif dalam mengurangi kasus pelecehan seksual di ruang publik.

Kata Kunci: Strategi, Cosplay, Pelecehan Seksual, Event Jejepangan.

Pendahuluan

Kejahatan adalah fenomena sosial yang dapat mencerminkan berbagai kondisi struktural dalam masyarakat, dan memiliki dampak yang luas terhadap individu dan komunitas. Secara umum, definisi kejahatan mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dan dapat muncul dari berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan ekonomi, terbatasnya akses terhadap pendidikan, dan ketidakstabilan sosial (Sri Priyati, 2015). Fenomena ini

menunjukkan bahwa pelecehan seksual merupakan isu yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga terkait dengan faktor sosial-budaya dan struktural, seperti budaya menyalahkan korban, dimana kasus seperti ini harus diatasi melalui pendekatan kolektif.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar integritas dan hak asasi seseorang, baik melalui kekerasan fisik maupun verbal (Stephanie, 2024). Secara definisi, kejahatan seksual terjadi ketika terdapat penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan hubungan yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan tidak senonoh dan mengakibatkan kerugian pada korban. Tindakan ini tidak terbatas pada kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, serta tindakan intimidasi yang mengandung unsur seksual.

Sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual, pelecehan seksual sering terjadi di ruang publik. Definisi pelecehan seksual mengacu pada tindakan atau pernyataan yang bersifat tidak diinginkan dan bernuansa seksual, seperti sentuhan tidak pantas ataupun kata-kata yang merendahkan. Survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 78% responden perempuan dan 29% responden laki-laki pernah mengalami bentuk pelecehan seksual di ruang publik. Data ini menegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan isu serius yang mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan warga di ruang publik. Meskipun data sementara menunjukkan tingginya risiko pelecehan seksual di berbagai event, penelitian sebelumnya jarang mengulas lebih dalam konteks dan reaksi individu terhadap pelecehan tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengisi celah pada riset penelitian sebelumnya serta memahaminya dalam kerangka teori ruang publik Habermas.

Berbagai bentuk acara seperti *cosplay* jepangan yang kian populer di masyarakat juga tidak luput dari permasalahan pelecehan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa dari 3.600 pengunjung *event cosplay* jepangan, 59% menganggap pelecehan seksual sebagai isu serius, sementara 25% mengaku pernah menjadi korban (Janelle Asselin, 2018). Dalam konteks ini, pelecehan seksual tidak hanya mencederai hak individu, tetapi juga merusak citra dan kenyamanan dari sebuah *event*, terutama ketika batasan antara kostum fiksi dan identitas nyata tidak selalu dipahami dengan jelas oleh semua peserta.

Meningkatnya perhatian terhadap isu pelecehan seksual dalam ruang publik, termasuk *event cosplay* menuntut adanya edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai batasan interaksi yang sesuai. Berdasarkan survei 2018, 59% pengunjung melihat pelecehan seksual sebagai isu serius. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mendalam tentang etika dan norma yang harus dijaga dalam setiap interaksi, terutama di ruang publik yang melibatkan keragaman latar belakang dan usia. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi lebih dalam bagaimana

strategi pencegahan digunakan dalam menghadapi kasus pelecehan seksual di *event* jejepangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai suatu pendekatan yang fokus pada mengeksplorasi makna yang dilekatkan oleh informan yang berbeda terhadap isu-isu yang dibahas (Creswell, 2016). Metode studi kasus digunakan juga dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menyelidiki kasus dan fenomena dalam situasi dunia nyata secara rinci dan komprehensif. Pendekatan ini menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami signifikansi kasus atau fenomena yang diteliti. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menyelidiki kasus-kasus unik, kompleks, atau langka untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena yang peneliti pelajari (Creswell, 2016:23). Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan informan *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 pengunjung *cosplay* dan 5 penyelenggara *event*, serta dilakukan observasi di lokasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk menggali tema yang muncul dari data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan member *checking*.

Hasil dan Pembahasan

Esensi Kegiatan *Event* Jejepangan di Ruang Publik

Cosplay dalam *event* jejepangan berperan sebagai medium presentasi diri yang signifikan dalam ruang publik inklusif. Melalui kostum dan karakter yang dipilih, individu dapat mengekspresikan identitas, kreativitas, dan ketertarikannya terhadap budaya Jepang. Interaksi antar-*cosplayer* dan pengunjung menciptakan dialog terbuka sesuai prinsip Habermas, di mana pertukaran ide tentang teknik kostum, interpretasi karakter, atau cerita anime menjadi dasar kesepakatan sosial (Habermas, 1984). Ruang ini juga memfasilitasi pertukaran budaya dan memungkinkan peserta dari berbagai latar belakang untuk dapat belajar serta menghargai nilai-nilai budaya melalui representasi *visual* dan naratif yang mereka adopsi. Dengan demikian, *cosplay* tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang memperkuat rasa kebersamaan komunitas.

Fenomena *cosplay* dalam ruang publik *event* jejepangan tidak sekadar menirukan karakter, melainkan bentuk aktualisasi diri. Peserta menggunakan *cosplay* untuk memperkuat atau memperluas aspek kepribadian mereka, seperti keberanian, kepercayaan diri, atau minat terhadap seni. Proses ini melibatkan pembelajaran keterampilan baru, seperti menjahit, membuat properti, dan interaksi dengan komunitas sefrekuensi. Ikatan sosial yang terbentuk

dari minat bersama sebagai sesama *fandom anime, game*, atau karakter tertentu menjadi pendorong utama partisipasi berkelanjutan. *Cosplayer* merasa termotivasi untuk terus terlibat karena pengalaman positif, seperti rasa bangga saat berhasil mengekspresikan diri atau memperluas jaringan pertemanan.

"Karena itu kayak *self expression* gitu ya. Nggak tiap hari bisa keluar pakai wig, pakai kostum yang bagus-bagus. Terus apalagi banyak temen yang dapat dari cosplay Apalagi se-fandom kan, ngomongnya langsung nyambung gitu." (C, 2024).

Representasi identitas dalam *cosplay* juga mencerminkan dinamika presentasi diri seperti pernyataan dari Erving Goffman (Habermas, 1967). *Cosplayer* memanfaatkan *front stage* dari *event* jejepangan untuk menampilkan versi diri yang terinspirasi karakter, termasuk eksplorasi peran gender, budaya, atau ciri kepribadian. Misalnya, seorang *introvert* mungkin menjadi lebih *ekstrovert* saat berperan sebagai karakter percaya diri, sementara warna kulit atau pengalaman hidup bisa menjadi dasar pemilihan karakter. Proses ini tidak hanya tentang transformasi visual, tetapi juga upaya menciptakan narasi diri yang lebih otentik. Konformitas yang dirasakan oleh pelaku *cosplay* menunjukkan bagaimana ruang ini menjadi laboratorium identitas yang aman. Motivasi seorang *cosplayer* bersifat multidimensi dan mencakup kebutuhan akan ekspresi diri, pengakuan komunitas, dan pelarian dari rutinitas. Sebagian peserta melihat *cosplay* sebagai bentuk pelampiasan stres, sementara yang lain menikmatinya sebagai hobi atau peluang bersosialisasi. Pernyataan seperti "Aku bisa bersosialisasi sama orang lain" atau "ngomongnya langsung nyambung" menegaskan bahwa ruang ini berfungsi sebagai "rumah" bagi mereka yang mencari penerimaan sosial. Dengan memadukan seni, interaksi, dan eksplorasi identitas, *cosplay* menjadi katalisator pertumbuhan pribadi sekaligus penguatan komunitas berbasis minat bersama, sesuai visi Habermas tentang ruang publik yang egaliter dan dialogis.

Pelecehan Seksual di *Event* Jejepangan Sebagai Masalah Sosial

Pelecehan seksual di ruang publik seperti *event* jejepangan merupakan masalah yang mengakar, muncul dalam bentuk komentar tidak pantas, sentuhan fisik tanpa persetujuan, atau pemotretan tanpa izin, terutama terhadap peserta *cosplay* yang mengekspresikan diri melalui kostum unik. Meski diakui sebagai ancaman terhadap kenyamanan dan kebebasan berekspresi, insiden ini sering kali dianggap sebagai "masalah pribadi" yang dialami korban secara individual. Melalui teori imajinasi sosial C. Wright Mills, persoalan ini harus dilihat tidak hanya sebagai pengalaman personal, tetapi cerminan dinamika sosial-budaya yang lebih luas, seperti normalisasi objektifikasi tubuh, minimnya kesadaran akan batasan konsensual,

serta struktur kekuasaan yang memengaruhi interaksi di ruang publik (Mills, 1959 : 211).

Sebagai *personal trouble*, pelecehan seksual meninggalkan dampak psikologis mendalam seperti trauma, rasa malu, dan isolasi sosial pada korban. Ketidakpastian dalam melaporkan atau ketakutan akan stigma sering memperparah kondisi ini, membuat korban merasa tidak didukung oleh lingkungan sekitar. Namun, ketika pengalaman serupa diungkapkan secara kolektif, misalnya melalui forum daring atau kampanye, maka kesadaran masalah ini bergeser menjadi *public issue*. Pola yang terungkap menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukanlah insiden terisolasi, melainkan gejala sistemik yang dipengaruhi oleh budaya permisif, kurangnya mekanisme perlindungan di acara-acara, serta ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Transformasi dari *trouble* ke *issue* memicu respons struktural, seperti advokasi untuk protokol keamanan yang ketat, edukasi tentang *consent*, dan pembentukan komunitas pendukung di kalangan peserta. Perlawanan ini mendorong penyelenggara *event* untuk mengadopsi kebijakan anti-pelecehan, menyediakan tim respons cepat, dan menciptakan norma sosial yang menolak toleransi terhadap perilaku tidak pantas. Dengan demikian, pengalaman korban yang awalnya dipinggirkan menjadi katalis perubahan dan memperkuat ruang publik sebagai ruang inklusif yang menjamin kebebasan berekspresi tanpa ancaman kekerasan atau diskriminasi.

Bentuk Pelecehan Seksual yang Terjadi di *Event* Jejepangan

Penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam setiap acara, terutama yang melibatkan komunitas dengan minat khusus seperti *cosplay*. Dalam event *cosplay*, terdapat laporan tentang berbagai bentuk pelecehan seksual, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah mitigatif yang lebih terstruktur.. Beragam pelecehan seksual yang diterima oleh para pengunjung *event* jejepangan pelaku *cosplay* menunjukkan betapa pentingnya upaya lebih untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua peserta.

1. Memegang Tanpa Izin

Pelecehan fisik atau tanpa izin adalah bentuk pelecehan seksual paling umum yang diterima, baik secara umum maupun dalam acara *event* jejepangan. Tindakan memegang tanpa izin ini dapat berupa sentuhan yang tidak pantas, meraba-raba, atau bahkan bentuk penyerangan fisik yang lebih parah. Berdasarkan hasil wawancara, kejahatan ini sering terjadi

sembari pelaku mengajak korban untuk foto dengan tujuan memotong jarak dengan korban, dimana ketika mereka akan mengajak foto, pelaku akan memegang anggota badan pribadi hingga langsung merangkul korban. Para pelaku seringkali memanfaatkan keramaian dan suasana santai dari *event* jejepangan untuk melakukan tindakan tidak senonoh ini tanpa khawatir konsekuensinya. Mereka memanfaatkan situasi dimana perhatian orang terfokus pada acara, pertunjukan, atau kesibukan lain, sehingga perilaku mereka sulit terdeteksi orang lain.

“Nah, disitu tuh mereka tuh kayak tertarik ke paha aku gitu jadi diliatin Dan kadang-kadang minta foto tuh cuma buat deket-deket atau nggak Megang-megang aja lah Terus kayak tiba-tiba aja dateng rangkul gitu Itu bikin aku nggak enak banget lah”(CR, 2024).

“Aku kan memang orangnya tuh nggak nyaman, kalau di atas sentuh-sentuh, nah tiba-tiba ada orang, apa ya, konten kreator lumayan bernama, dan tiba-tiba dia minta foto, dan aku nggak tau mau dipegang, dia di Kabedon aku.”(B, 2024).

Salah satu informan menceritakan bahwa pernah menjadi korban pelecehan seksual dalam bentuk *Kabedon*. *Kabedon* adalah tindakan seseorang dengan menamparkan tangannya ke dinding sebelah pihak lawan lalu menjepit pihak tersebut tersebut di posisinya dengan dekat. *Kabedon* adalah hal yang sempat populer di anime atau manga, maka dari itu aktivitas ini sering ditiru oleh para penggemar anime, sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan genit, kabedon memang dilakukan secara sepihak dengan tujuan membuat pihak lawan terkejut, namun di dunia nyata. Melakukan tindakan kabedon dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual apabila tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak, karena pihak lawan belum tentu merasa nyaman didorong ke tembok tanpa izin, maka dari itu *Kabedon* yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini dapat dikategorisasikan sebagai pelecehan seksual

2. Pelecehan verbal

Pelecehan verbal adalah bentuk pelecehan seksual lain paling umum yang diterima baik secara umum maupun dalam acara *event* jejepangan. Komentar bernada seksual atau permintaan yang tidak pantas sering dilemparkan oleh pengunjung tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap batasan pribadi serta hak untuk merasa aman dan nyaman di ruang publik. Pelecehan verbal di *event* jejepangan biasa diberikan kepada para pelaku *cosplay* yang menggunakan kostum yang tergolong terbuka. Komentar bernada seksual, seperti menggoda dengan ucapan vulgar atau menyebutkan bagian tubuh tertentu secara dari secara bisik-bisik dengan orang lain hingga terang-terangan sering kali ditujukan kepada *cosplayer* yang dianggap “menarik perhatian” dan dengan kalimat tersebut biasa diberikan kepada pelaku *cosplay* yang menggunakan karakter perempuan.

“...Sempat ada satu fotografer gitu kan minta foto ke aku. Tapi minta fotonya awalnya ya udah biasa -biasa aja kan, tapi emang dia mengarah ke minta ke tempat yang sepi gitu. Nah terus dari situ lama-lama dia fotonya tuh minta yang pose aneh-aneh gitu, sebenarnya aku sempat nolak gitu, bahkan aku sampai pura -pura nelpon temen aku...”(NM, 2024).

Bentuk lain dari pelecehan verbal ini bisa terjadi ketika pelaku meminta foto bersama ataupun memfoto korban sendiri menggunakan kamera profesional ataupun *Handphone*. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku akan meminta korban untuk melakukan pose yang dapat dikategorisasikan sebagai vulgar dan seksual, sehingga memberikan korban rasa tidak nyaman. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan memanfaatkan situasi dengan mengajak korban ke tempat yang sepi, kemudian secara bertahap memaksa korban untuk mengikuti permintaannya, meskipun korban sudah menunjukkan penolakan. Bahkan ketika korban berusaha menghindar, pelaku tetap memaksa, seperti menarik korban untuk *selfie* tanpa persetujuan yang semakin mempertegas pelanggaran terhadap batasan pribadi.

3. *Stalking*

Stalking atau menguntit adalah bentuk lain dari pelecehan seksual yang terjadi di *event* jejepangan. Menguntit di *event* jejepangan dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual karena melibatkan perhatian yang tidak diinginkan dan terus-menerus yang dapat membuat target merasa tidak aman dan terancam. Perilaku ini mencakup mengikuti korban di sekitar konvensi yang merupakan bentuk invasi dari ruang pribadi mereka, sehingga membuat korban merasa selalu diawasi oleh pihak atau orang tertentu.

“...dan aku notice kalau misalnya ada satu orang yang ngikutin aku dari lantai atas sama lantai bawah...”(CL, 2024).

Penyebab Pelecehan Seksual Terjadi di *Event* jejepangan Menurut Pengunjung

Dalam memahami akar penyebab pelecehan seksual di *event* jejepangan, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang berkontribusi. Data dari informan menunjukkan bahwa banyak dari mereka mengalami berbagai bentuk pelecehan seksual selama acara dan mengindikasikan adanya sejumlah alasan yang mendasari perilaku tersebut. Analisis penyebab pelecehan seksual di *event* jejepangan berdasarkan data dari informan menunjukkan berbagai alasan mengapa pelecehan seksual terjadi.

1. Area yang Ramai

Area yang ramai di *event* jejepangan secara signifikan berkontribusi terhadap terjadinya

pelecehan seksual karena beberapa faktor yang saling terkait. Kepadatan pengunjung yang tinggi menciptakan lingkungan di mana individu dapat dengan mudah berbaur dengan kerumunan, sehingga memudahkan pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak pantas tanpa menarik perhatian. Dalam suasana yang ramai seperti itu, jumlah orang yang begitu banyak dapat membanjiri kemampuan korban dan pengamat untuk mengidentifikasi dan merespons pelecehan yang mengarah pada situasi dimana tindakan yang tidak pantas dapat tidak diketahui atau tidak mendapat tanggapan oleh pengunjung.

“Karena menurut aku kesempatan dalam kesempitan sih, karena kan event Jepangan kan kayak relatif rame gitu ya, jadi kayak orang-orang mikirnya kayak gitu. Jadi kayak menggunakan masa yang rame untuk melakukan kegiatannya gitu.”(CL, 2024).

Ramai dan penuhnya acara mengalihkan perhatian petugas keamanan dan staf acara, sehingga mengurangi kapasitas mereka untuk memantau dan menangani insiden pelecehan secara efektif. Kurangnya pengawasan ini dapat memberi kesempatan kepada para pelaku yang mungkin merasa bahwa mereka dapat bertindak tanpa hukuman di tengah kerumunan orang banyak. Di sisi lain, para korban mungkin merasa terjebak atau tidak berdaya dalam lingkungan seperti itu karena jarak yang dekat dapat menyulitkan mereka untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan atau mencari bantuan dari orang lain. Suasana yang luar biasa juga dapat menyebabkan rasa disorientasi, sehingga lebih sulit bagi individu untuk menegaskan batasan mereka atau untuk mengenali ketika mereka dilecehkan.

Ruang yang ramai dapat menciptakan rasa aman yang fana, dimana para pengunjung mungkin berasumsi bahwa kehadiran banyak orang akan mencegah pelecehan. Namun, kesalahpahaman ini dapat menimbulkan rasa puas diri karena individu mungkin tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri atau melakukan intervensi ketika mereka menyaksikan perilaku yang tidak pantas.

2. Kurangnya Edukasi

Kurangnya edukasi mengenai pelecehan seksual secara signifikan berkontribusi pada prevalensi pelecehan seksual di *event* jepangan. Banyak peserta, terutama yang dibawah umur tidak sepenuhnya memahami konsep persetujuan dan pentingnya menghormati batasan-batasan pribadi. Kesenjangan dalam pengetahuan ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas atau berbahaya menjadi normal karena individu mungkin tidak mengenali tindakan tertentu-seperti sentuhan yang tidak diinginkan atau pelecehan verbal sebagai pelanggaran. Selain itu, banyak peserta yang hadir adalah anak di bawah umur yang tidak memiliki pengalaman dan pemahaman yang diperlukan untuk menavigasi situasi yang berpotensi

berbahaya, sehingga mereka lebih rentan terhadap perilaku predator.

“Mungkin orang yang melakukan pelecehan seksual itu kurang edukasi tentang pelecehan seksual tersebut. Atau mungkin ketika dia pernah melakukannya, gak ada yang melarang atau gimana. Jadi dia merasa itu merupakan suatu hal yang benar gitu.”(RY, 2024).

“Sebenarnya pelecehan seksual ada di mana-mana ya. apalagi di Indonesia ini kurang sex education.”(B, 2024).

Merujuk pada sudut pandang pelaku, kurangnya edukasi mengenai pelecehan seksual di jejepangan dapat menciptakan lingkungan dimana perilaku yang tidak pantas lebih mungkin terjadi. Banyak orang mungkin tidak sepenuhnya memahami tentang apa yang termasuk pelecehan seksual, sehingga mereka salah paham atau meremehkan dampak dari tindakan mereka. Mereka mungkin percaya bahwa perilaku tertentu, seperti sentuhan yang tidak diinginkan atau komentar sugestif dapat diterima atau bahkan disanjung, terutama dalam lingkungan *cosplay*. Kurangnya kesadaran ini dapat menumbuhkan rasa memiliki hak, dimana para pelaku merasa dibenarkan dalam tindakan mereka karena mereka tidak menganggap tindakan tersebut berbahaya atau tidak sopan.

3. Pengunjung Berkebutuhan Khusus dan Pelecehan seksual

Pengunjung berkebutuhan khusus dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada situasi pelecehan seksual yang terjadi di *event* jejepangan karena adanya perbedaan dalam cara berinteraksi. Perlu dicatat bahwa daya tarik anime terletak pada ekspresinya yang lebih-lebihkan dan isyarat visual yang jelas untuk membantu seorang autis dalam menafsirkan emosi dan niat dengan lebih mudah daripada harus berinteraksi di kehidupan nyata. Kelebihan dari visual ini mendorong anime menjadi populer di kalangan berkebutuhan khusus. Namun, ketergantungan pada kejelasan visual ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam konteks sosial di mana isyaratnya kurang eksplisit. Seorang individu yang berada dalam spektrum autisme mungkin tidak mengenali batas-batas pribadi atau *consent*, sehingga membuat mereka terlibat dalam perilaku-seperti menyentuh kostum atau memulai percakapan-yang dapat dianggap mengganggu atau tidak pantas.

“...Dan ini maaf karena yang datang ke event itu kebanyakan anak berkebutuhan khusus, yang tidak didampingi oleh orang tua. Begitu masalahnya. Jadi apa mungkin orang tuanya terlalu ngelepas anaknya, padahal anaknya kayak, maaf ya ada kelainan atau gimana, aku nggak tahu, ABK gitu...”(B, 2024).

Lingkungan *event* jejepangan yang penuh akan sensorik dapat membuat mereka kewalahan, sehingga berpotensi menyebabkan mereka bertingkah laku yang tidak lazim bagi

mereka, seperti menjadi terlalu bersemangat atau berteriak dan akhirnya dapat mengganggu orang lain. Fokus mereka yang kuat pada minat tertentu, seperti anime juga dapat menghasilkan interaksi yang antusias, sehingga semakin memperumit dinamika sosial. Individu dengan Gangguan Spektrum Autisme (ASD) mengalami kesulitan dalam komunikasi sosial dan memahami norma-norma sosial yang dapat menyebabkan pelecehan yang tidak disengaja. Fokus mereka yang kuat pada minat tertentu, seperti anime dapat mendorong mereka untuk secara antusias terlibat dengan orang lain dan berpotensi membuat mereka dengan perbedaan minat kewalahan untuk menanggapi individu tersebut.

4. Fetishisasi *Cosplay*

Fetishisasi *cosplay* dalam *event* jejepangan dapat menjadi salah satu faktor yang memicu pelecehan seksual, terutama ketika individu melihat *cosplayer* bukan sebagai peserta yang mengekspresikan diri, tetapi sebagai objek fantasi.

“Kita tuh sebenarnya kalau kita ngomong seksual gitu, kita semua cowok dan cewek sama-sama ada. Yang namanya fetish itu pasti ada ya. Nah masalahnya sialnya cowok lebih gampang kayak nggak kekontrol, nggak bisa ngatur masalah nafsu mereka gitu.”(RF, 2024).

Ketika karakter-karakter dalam game atau anime yang sering memiliki desain kostum terbuka di fetishisasi, ada kecenderungan sebagian orang menerapkan pandangan serupa pada *cosplayer* yang mengenakan kostum tersebut di dunia nyata. Fetishisasi *cosplay* tidak hanya memperburuk risiko pelecehan, tetapi menciptakan lingkungan yang tidak aman jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam *event* jejepangan.

Hubungan *Cosplay* dan Pelecehan Seksual

Topik yang paling diperdebatkan dalam studi kasus pelecehan seksual adalah pertanyaan apakah cara berbusana korban mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, dan skripsi ini tidak akan jauh dari perdebatan tersebut. Aktivitas *cosplay* yang secara esensi berubah menjadi karakter yang bukan dirinya, yang dalam esensi tersebut, para pelaku *cosplay* akan berdandan dan mengenakan pakaian layaknya karakter yang akan diperankan. Cara berpakaian karakter fiksi yang berbeda dengan pakaian sehari-hari menjadi perhatian pengunjung *event* jejepangan lain, terutama bagi pengunjung yang masih asing terhadap kegiatan tersebut, maka dari itu ada perbedaan pendapat dalam topik apakah kostum dan karakter yang dimainkan oleh pelaku *cosplay* mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual,

1. Argumen *Cosplay* Menyebabkan Pelecehan Seksual

Argumen bahwa *cosplay* dapat menyebabkan pelecehan seksual sering bergantung pada persepsi para *cosplayer*, terutama *cosplayer* perempuan yang menjadi studi kasus ini, dengan sikap masyarakat seputar pilihan kostum mereka. Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa sifat pakaian *cosplay* tertentu sering terbuka atau dirancang untuk meniru karakter yang berbau seksual yang dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang persetujuan dan batasan-batasan pribadi. Persepsi ini berakar pada kecenderungan masyarakat yang lebih luas untuk menilai individu, terutama wanita berdasarkan penampilan mereka. Ketika *cosplayer* mengenakan pakaian yang terinspirasi dari karakter yang dikenal dengan penggambaran seksualnya, hal ini dapat menciptakan narasi bahwa orang-orang ini entah bagaimana mengundang perhatian atau perilaku tidak pantas. Kesalahpahaman ini dapat melanggengkan stereotip yang berbahaya tentang perempuan dan agensi mereka dan menunjukkan bahwa pilihan pakaian mereka mendikte bagaimana mereka harus diperlakukan.

“Kalau misalnya yang pakaian terbuka gitu ya. Game-game sekarang kan rata-rata banyak yang pakaian terbuka, itu kan istilahnya kayak mendorong...”(RF, 2024).

“Mendorong banget. Kenapa? Ada beberapa, terutama karakter game ya. Karena karakter game kan biasanya terbuka banget. Lebih terbuka”(Y, 2024).

“Lumayan mempengaruhi sih soalnya apalagi kalau yang misalnya di bawah umur cewek dan karakternya agak terbuka.. Itu tuh pasti kadang tuh bisa mancing..”(L, 2024).

Perspektif ini menyatakan bahwa sifat visual *cosplay* dapat mengakibatkan objektifikasi *cosplayer* dan menyebabkan beberapa orang memandang mereka bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai representasi karakter yang mereka perankan. Objektifikasi ini dapat menyebabkan terlepasnya *cosplayer* dari realitas bahwa *cosplayer* adalah individu dengan perasaan, batasan, dan hak-hak mereka sendiri. Ketika orang melihat seorang *cosplayer*, terutama seorang wanita dengan kostum yang terbuka, mereka mungkin tidak mengenalinya sebagai orang yang layak dihormati dan memiliki otonomi. Sebaliknya, mereka mungkin melihatnya sebagai perwujudan dari fantasi yang dapat mengarah pada komentar tidak pantas, rayuan, atau bahkan kontak fisik. Perilaku ini sering dibenarkan oleh kesalahpahaman bahwa pakaian *cosplayer* adalah undangan untuk interaksi semacam itu yang semakin memperkuat gagasan bahwa persetujuan itu bersyarat dan berdasarkan penampilan.

Argumen ini terkait dengan norma-norma budaya yang lebih luas terkait gender dan seksualitas, di mana perempuan seringkali dinilai berdasarkan penampilan mereka, dan ekspektasi untuk bersikap akomodatif dapat menormalkan pelecehan dalam lingkungan yang lazim. Dalam budaya umum, termasuk Indonesia, perempuan diekspektasikan untuk bersikap sopan dan akomodatif yang dapat menciptakan lingkungan dimana pelecehan diabaikan.

Normalisasi pelecehan ini dapat terwujud dalam *event* jejepangan, dimana atmosfernya mungkin secara tidak sengaja menunjukkan bahwa perilaku tertentu dapat diterima. Gagasan bahwa perempuan harus mentolerir perhatian atau rayuan yang tidak diinginkan karena pilihan kostum mereka memperkuat budaya yang memaklumi perilaku tidak pantas dan membagi beban tanggung jawab pada korban. Tidak membantu fakta bahwa argumen ini juga diberikan oleh laki-laki, meskipun jawaban ini diberikan tanpa niat buruk untuk menyalahkan korban dan hanya menunjukan korelasi antara kostum dan pelecehan seksual. Hal ini tetap secara tidak langsung adalah bukti hadirnya budaya patriarki dalam komunitas budaya pop jejepangan, yang memberikan konsekuensi baik dalam komunitas atau masyarakat yang lebih luas.

Dibagikannya tanggung jawab bagi korban pelecehan seksual adalah bentuk peremehan pada pengalaman mereka yang menghadapi pelecehan dan mengarah pada penyalahan kepada korban. Ketika masyarakat melanggengkan gagasan bahwa individu juga bertanggung jawab atas tindakan orang lain berdasarkan penampilan mereka, hal ini menciptakan pernyataan berbahaya yang merusak prinsip-prinsip persetujuan dan kebebasan pribadi. Narasi ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat secara langsung ataupun terbatas pada *event* jejepangan, tetapi juga berkontribusi pada penerimaan masyarakat yang lebih luas terhadap pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan secara umum.

2. Argumen *Cosplay* Tidak Menyebabkan Pelecehan Seksual

Argumen bahwa *cosplay* tidak menyebabkan pelecehan seksual berpusat pada gagasan bahwa pelecehan adalah perilaku yang berakar pada tindakan dan sikap pelaku pelecehan, daripada pilihan yang dibuat oleh individu yang menjadi target. Perspektif ini menekankan bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan tidak ada yang bisa disalahkan atas perilaku orang lain yang tidak pantas berdasarkan pakaian atau penampilan mereka. *Cosplay*, sebagai bentuk ekspresi diri dan kreativitas, harus dirayakan karena nilai artistik dan kegembiraan yang dibawanya kepada para peserta, daripada diteliti karena potensinya untuk memancing perhatian tidak diinginkan. Argumen ini menegaskan bahwa fokusnya haruslah pada mendidik individu tentang persetujuan dan rasa hormat, daripada menempatkan tanggung jawab pada *cosplayer* untuk memodifikasi pakaian atau perilaku mereka untuk menghindari pelecehan.

“Bagi aku, menurut aku emang beberapa karakter itu ada yang memakai pakaian terbuka, dan itu tuh menarik perhatian yang tidak diinginkan lah Cuma manusia itu tuh harus ada pikiran lah Maksudnya kayak mereka tuh cosplay buat seneng-seneng Bukan buat dilecehin gitu.”(CR, 2024).

“Jujur engga, karena gue emang liat poster hijab aja pernah jadi kasus pelecehan

seksual kan Jadi kayak gak terbuka atau tertutup itu gak mengaruhi kepada kalau orang-orang yang ada bejat di awal. Kalau niat mereka ke event wibu itu buat ngelecehin cosplayer Pasti bakal dilakuin.”(C, 2024).

“Enggak, bukan. Karena memang pelakunya aja yang niatnya udah jahat.”(CL, 2024).

“Oke, kalau dikata sih hubungan kostum dengan pelajaran seksual harusnya nggak ada. Cuma memang di Indonesia ini orang-orangnya itu nggak bisa kita kontrol banget...”(M, 2024).

Argumen yang menentang gagasan bahwa *cosplay* menyebabkan pelecehan menyoroti pentingnya akuntabilitas dan dukungan komunitas. Banyak *cosplayer* dan peserta konvensi yang secara aktif mengadvokasi budaya persetujuan serta rasa hormat dengan mempromosikan pesan bahwa *cosplay is not consent*. Gerakan ini berusaha memberdayakan individu untuk berbicara menentang pelecehan dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka, daripada membiarkan norma-norma masyarakat untuk menekan sikap atau perilaku yang dapat diterima. Dengan membina komunitas yang mendukung serta memprioritaskan keamanan dan rasa hormat, komunitas *cosplay* dapat bekerja untuk membongkar narasi berbahaya yang menunjukkan bahwa pilihan pakaian adalah penyebab pelecehan.

Implikasi dari argumen ini lebih signifikan karena mereka menyerukan pergeseran fokus dari perilaku *cosplayer* ke kebutuhan pendidikan dan kesadaran yang komprehensif seputar persetujuan dan pelecehan. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi *cosplayer*, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang mengakui pentingnya persetujuan dan rasa hormat dalam semua interaksi, dimana perubahan sosial dapat merefleksikan arah perkembangan masyarakat umum dan tidak terbatas pada studi kasus *event* jepangan.

Keterlibatan Panitia dan Keamanan di *Event* Jepangan

Keterlibatan pihak panitia dan divisi keamanan di *event* jepangan sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua peserta. Panitia bertanggung jawab untuk memastikan acara berjalan dengan lancar, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk pengawasan terhadap keamanan dan kenyamanan pengunjung. Pihak keamanan tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga diharapkan dapat merespons situasi darurat, termasuk kasus pelecehan seksual. Keterlibatan aktif pihak keamanan sangat penting untuk memberikan dukungan kepada korban dan menangani insiden dengan cepat.

“Kalau itu kita sudah pernah membuat ngeban dia dari event karena ada banyak juga masukan dari cosplayer-cosplayer yang kebetulan teman-teman kami juga Itu mereka meminta untuk di-ban aja untuk event ini karena kurang nyaman”.(STP, 2024).

Pihak penyelenggara telah mengambil langkah tegas dengan melakukan larangan

terhadap individu yang telah menerima banyak masukan negatif dari *cosplayer* lain. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap keluhan yang muncul, dimana banyak peserta merasa tidak nyaman dengan kehadiran pelaku tersebut. Dengan mendengarkan suara komunitas, pihak penyelenggara menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua peserta serta menegaskan bahwa tindakan pelecehan seksual tidak akan ditoleransi.

"Cuma aku pernah ada aduan ketika temen mendapatkan tindakan asusila dari orang lain, Aku berusaha buat menenangkan korbannya dulu pertama."(RHN, 2024).

Dalam situasi di mana tindakan asusila terjadi, pihak keamanan berfokus pada penanganan korban dengan cara yang sensitif. Salah satu informan menyatakan bahwa mereka berusaha menenangkan korban terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pihak keamanan tidak hanya berperan dalam penegakan aturan, tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional kepada korban yang merupakan langkah penting dalam proses pemulihan mereka.

"...kita biasanya gak secara langsung mengumumkan pelaku melalui akun official media yang saya punya tapi secara underground komunitas menyampaikan bahwa ada suatu pelaku dengan kriteria tersebut atau mungkin foto nyatanya akan kita invoke kepada komunitas nih ada pelaku mukanya ini hati-hati kedepannya kalo ketemu orang ini buat selalu jaga-jaga..."(FTH, 2024).

Pihak keamanan juga menerapkan strategi komunikasi yang hati-hati dalam menangani pelaku pelecehan seksual. Mereka tidak mengumumkan identitas pelaku secara terbuka melalui media resmi, melainkan menggunakan pendekatan *underground* untuk menyebarkan informasi di dalam komunitas. Ini termasuk berbagi foto dan deskripsi pelaku kepada anggota komunitas agar mereka dapat lebih waspada. Dengan cara ini, pihak keamanan berusaha melindungi peserta tanpa menciptakan stigma yang berlebihan atau memperburuk situasi bagi korban, serta memastikan bahwa semua orang dapat menjaga diri mereka sendiri di masa depan.

Kehadiran dan keterlibatan langsung dari pihak keamanan dalam *event* jejepegan sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan semua peserta. Berdasarkan informasi dari para informan, ketidakhadiran pihak keamanan yang aktif mengakibatkan kekurangan dukungan saat insiden pelecehan seksual terjadi dan meninggalkan korban tanpa bantuan yang memadai. Pihak keamanan seharusnya tidak hanya bertugas untuk menjaga ketertiban acara, tetapi juga untuk merespons dengan cepat terhadap laporan dan situasi darurat, termasuk kasus pelecehan seksual. Jika pihak keamanan tidak terlibat secara proaktif, maka pelaku pelecehan dapat merasa bebas bertindak tanpa takut akan konsekuensi, sementara korban tidak memiliki saluran yang jelas untuk melaporkan kejadian tersebut.

“*Enggak, karena itu bukan di Venue*”(CL, 2024).

“*Lagi sama teman, cuma teman aku pun juga lagi diajak-ajak foto Jadi kita nggak bisa*”(CL, 2024).

“*Kadang orang suka bingung mau nge-report kemana kalau terjadi apa-apa*”(C,2024).

Meskipun terdapat keterlibatan panitia dan pihak keamanan di *event* jepengangan, banyak pengunjung yang merasa tidak mendapatkan bantuan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan pengawasan yang membuat panitia dan keamanan tidak dapat memantau seluruh area *event* secara efektif, terutama di lokasi-lokasi yang ramai atau diluar *venue* resmi. Selain itu, pengunjung sering merasa bingung kemana harus melapor ketika mengalami insiden, sehingga mereka tidak mendapatkan respons yang cepat dari pihak keamanan. Rasa isolasi sosial juga berkontribusi pada perasaan ini, dimana banyak pengunjung merasa sendirian dan tidak memiliki dukungan dari teman-teman mereka saat menghadapi situasi pelecehan. Ketakutan akan stigma sosial dan konsekuensi dari melaporkan insiden juga membuat beberapa pengunjung enggan untuk mencari bantuan.

Pengaruh Isu Pelecehan Seksual di *Event* Jepengangan

Pelecehan seksual di *event* jepengangan berdampak signifikan pada komunitas in-group, terutama *cosplayer* dan pegiat budaya pop Jepang. Korban, termasuk anak di bawah umur yang banyak terlibat dalam acara ini mengalami trauma, kecemasan hingga depresi yang menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan komunitas. Seperti diungkapkan informan, kasus pelecehan sering melibatkan minoritas usia dan menciptakan kekhawatiran akan keamanan generasi muda yang mengekspresikan diri melalui kostum. Selain itu, perpecahan internal muncul akibat perbedaan sikap anggota komunitas yang sebagian mendorong kebijakan ketat dan toleransi nol terhadap pelecehan, sementara lainnya meremehkan masalah atau bahkan membela pelaku. Konflik ini memperburuk kohesi kelompok dan memicu marginalisasi sub komunitas tertentu.

Dampak lain pada in-group adalah desensitisasi dan kerusakan reputasi. Ketika pelecehan sering terjadi tanpa penanganan serius, perilaku tidak pantas dinormalisasi dan menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus. Hal ini mengikis kepercayaan anggota komunitas terhadap lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman berekspresi. Reputasi komunitas tercoreng dan dianggap ruang tidak aman, sehingga partisipasi dalam *event* menurun dan semangat kolektif melemah. Stigma terhadap *cosplayer* sebagai kelompok rentan atau "tidak bermoral" semakin memperparah isolasi sosial, bahkan di dalam komunitas itu sendiri.

Bagi out-group atau masyarakat umum, kasus pelecehan di *event* jepengangan

memperkuat stereotip negatif tentang komunitas budaya pop Jepang. Acara yang seharusnya dipandang sebagai ruang kreatif, justru dianggap berbahaya dan merusak citra positif budaya Jepang sebagai hiburan inklusif. Masyarakat luas mulai memandang peserta dengan kecurigaan, lalu menstigma *cosplayer* sebagai "tidak sopan" atau "provokatif" tanpa memahami konteks ekspresi diri mereka. Lebih jauh, insiden ini menjadi cermin masalah sosial yang lebih luas, seperti ketimpangan gender, objektifikasi tubuh, dan lemahnya pemahaman tentang *consent* yang juga terjadi di luar ruang subkultur.

Meski budaya pop Jepang di Indonesia bersifat *niche*, pelecehan seksual didalamnya memiliki urgensi universal. Kasus ini mengingatkan masyarakat bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di ruang manapun, termasuk yang dianggap "sekadar hiburan". Pemahaman ini mendorong solidaritas lintas kelompok untuk menuntut kebijakan perlindungan korban, edukasi tentang batasan personal, dan penegakan norma anti-pelecehan. Dengan demikian, refleksi atas masalah di *event* jejepangan tidak hanya memperkuat keamanan komunitas tersebut, tetapi juga berkontribusi pada gerakan kolektif menciptakan ruang publik yang inklusif dan bebas kekerasan bagi seluruh masyarakat.

Strategi Pencegahan Melalui Keterlibatan Pihak Penyelenggara dan Keamanan

Pihak penyelenggara dan keamanan harus terlibat secara aktif dalam strategi pencegahan pelecehan seksual di *event* jejepangan karena mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi semua peserta. Sebagai pihak yang menjalankan acara, keterlibatan mereka tidak hanya penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tetapi juga esensial untuk mencegah terjadinya berbagai insiden termasuk pelecehan seksual. Berdasarkan problematika di *event* jejepangan dan analisis Habermas dalam membuat strategi pencegahan, tindakan yang dapat diambil oleh pihak penyelenggara sekaligus petugas keamanan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bekerja Sama dengan Pihak Keamanan di Lokasi

Kerja sama antara pihak penyelenggara dan keamanan di lokasi *event* sangat penting untuk menjaga konsistensi dan efektivitas dalam menangani isu pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, ketika *event* diadakan di lokasi yang sudah ada pihak keamanan seperti *mall*, perhatian pihak *mall* sering tertuju pada menjaga ketertiban umum di area tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan pengabaian terhadap keamanan pengunjung yang hadir dalam *event*, sehingga menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi terhadap potensi pelecehan seksual. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk menyusun strategi yang memadukan ketertiban

acara dengan keamanan individu, dimana pihak keamanan diberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya melindungi peserta *event*. Ketepatan dalam kerja sama akan memastikan bahwa petugas keamanan yang berada di lokasi memahami kebijakan dan prosedur serta dilatih untuk memantau area yang berisiko tinggi secara lebih efektif. Hal ini mencakup pengawasan di titik-titik rawan dan pengaturan respons cepat ketika ada laporan mengenai pelecehan seksual. Dengan komunikasi yang efektif antara penyelenggara dan pihak keamanan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengunjung. Kesadaran bersama mengenai peran masing-masing akan memperkuat langkah-langkah *preventif*, sehingga masalah pelecehan seksual dapat ditangani secara proaktif dan bukan hanya reaktif setelah insiden pelecehan seksual terjadi.

2. Menekan pada Konsekuensi Hukum

Penting bagi penyelenggara dan pihak keamanan untuk menekankan konsekuensi hukum bagi pelaku pelecehan seksual sebagai langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman di *event* jejepangan. Penekanan ini seharusnya disampaikan melalui materi informasi yang mencakup peraturan *event* dan juga melalui pengumuman langsung di lokasi selama acara berlangsung. Dengan cara ini, pengunjung akan mendapat sinyal yang jelas bahwa tindakan pelecehan tidak akan ditoleransi dan bahwa ada sanksi tegas yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran. Melalui komunikasi yang efektif, peserta akan lebih memahami betapa seriusnya masalah ini dan pentingnya untuk menjaga perilaku selama acara.

Bentuk dari strategi ini dapat berupa pengumuman resmi mengenai ketentuan hukum tentang pelecehan seksual di *event* ini yang ditampilkan di poster, situs *website*, dan diumumkan secara berkala melalui pengeras suara dan tuliskan regulasi hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti:

1. UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) mengatur pelecehan seksual fisik dan nonfisik, termasuk komentar verbal, siulan bernuansa seksual, atau sentuhan tidak senonoh. Pelaku dapat dijera hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga Rp50 juta.
2. KUHP Pasal 289–296 menjerat pelaku pelecehan dengan ancaman 9 tahun penjara jika melibatkan kekerasan atau korban di bawah umur.
3. UU Pornografi Pasal 34 melarang perbuatan bernuansa seksual di ruang publik, termasuk catcalling atau ekspresi verbal yang mengganggu.

Selain undang undang yang berlaku, perlu dijelaskan juga segala perbuatan terlarang yang dikategorisasikan sebagai pelecehan seksual berupa:

1. Verbal: Ucapan bernuansa seksual, gurauan cabul, atau panggilan tidak pantas (contoh: "*Neko-chan, mau jadi waifu aku?*")
2. Fisik: Mencolek, meraba kostum, atau memaksa berfoto dengan pose tidak senonoh.
3. Visual: Memotret area tubuh tertentu tanpa izin atau mengunggah konten bernuansa seksual di media sosial

Diharapkan hal ini dapat berfungsi sebagai *deterrent* atau pencegah dan membuat individu untuk berpikir lebih matang sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ketakutan akan konsekuensi hukum dapat mengurangi niat untuk melakukan pelecehan, sehingga menciptakan suasana yang lebih aman bagi semua pengunjung. Informasi yang memadai dan transparan berperan aktif dalam menciptakan budaya yang menghargai keamanan dan kenyamanan setiap individu di dalam *event*.

3. Membuat *Space* untuk Edukasi tentang Bahaya Pelecehan Seksual

Memberikan informasi yang jelas dan akurat adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah pelecehan seksual. Untuk mencapai hal ini, pihak acara dapat membuat sebuah ruang edukasi yang secara khusus membahas bahaya pelecehan seksual serta cara mengenali dan mengatasi situasi berisiko. Ruang edukasi ini dapat diisi dengan kegiatan seperti seminar, *workshop*, atau panel diskusi yang menghadirkan narasumber berpengalaman dalam menangani isu pelecehan seksual, apalagi bila pihak ahli tersebut juga merupakan figur terkenal di *event* jejepangan. Melalui kegiatan tersebut, peserta dapat berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan yang aman serta mempelajari pentingnya komunikasi yang terbuka mengenai batasan pribadi.

Informasi yang tepat dan praktis diharapkan membuat pengunjung *event* jejepangan akan lebih siap untuk memahami pentingnya menjaga batasan pribadi dan persetujuan dalam interaksi sosial. Mereka juga akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana melindungi diri mereka serta orang lain dari potensi pelecehan. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi individu, tetapi juga memperkuat budaya saling menghormati didalam komunitas pengunjung. Pendidikan yang diberikan diharapkan membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan di lingkungan *event*.

4. Menambah Jumlah Staff di *Event* Jejepangan

Menambah jumlah staf di *event* jejepangan merupakan strategi yang sangat penting dan efektif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual serta meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Dalam konteks *event* besar seperti jejepangan yang biasanya dihadiri ribuan orang dengan berbagai latar belakang, risiko terjadinya insiden pelecehan seksual atau perilaku tidak pantas lainnya bisa meningkat. Oleh karena itu, kehadiran staf yang memadai dan terlatih menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Dengan bertambahnya jumlah staf, panitia dapat memastikan pengawasan di setiap area acara dilakukan secara lebih intensif. Staf yang ditempatkan di lokasi strategis, seperti area ramai, ruang *cosplay*, atau tempat istirahat dapat mengawasi aktivitas pengunjung dan mendeteksi potensi insiden pelecehan seksual sejak dini. Kehadiran mereka yang terlihat jelas juga dapat menjadi faktor pencegah bagi pelaku potensial karena mereka tahu bahwa tindakan mereka lebih mudah terpantau. Kehadiran staf yang banyak dan tersebar di seluruh area acara juga dapat menciptakan atmosfer yang lebih aman dan nyaman bagi pengunjung. Pengunjung, terutama perempuan atau kelompok rentan lainnya akan merasa lebih terlindungi ketika mereka tahu ada staf yang siap membantu di sekitarnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap panitia dan membuat mereka lebih menikmati acara tanpa rasa khawatir.

5. Menyediakan Pelatihan untuk Staf dan Relawa

Penting bagi pihak penyelenggara *event*, seperti jejepangan untuk memberikan pelatihan yang komprehensif kepada semua staf dan relawan yang terlibat. Pelatihan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan investasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan nyaman bagi semua pengunjung. Tanpa pelatihan yang memadai, staf dan relawan tidak akan memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana menghadapi situasi sensitif seperti pelecehan seksual yang berakibat pada penanganan yang kurang efektif atau bahkan memperburuk situasi. Pelatihan yang dilakukan melibatkan hal sebagai berikut:

1. Pelatihan harus mencakup pengenalan mendalam tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Hal ini penting karena pelecehan seksual tidak selalu terlihat jelas atau mudah dikenali. Misalnya, pelecehan bisa berupa komentar yang tidak pantas, sentuhan tanpa izin, atau bahkan tatapan yang membuat tidak nyaman. Staf dan relawan perlu memahami bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal, fisik, maupun non-fisik, dan bahwa setiap bentuk pelecehan adalah serius dan tidak dapat ditoleransi.

2. Pelatihan harus mengajarkan cara mengidentifikasi dan merespons laporan pelecehan seksual dengan sensitif dan empati. Korban pelecehan sering merasa takut, malu, atau bahkan bersalah, sehingga respons awal dari staf sangat penting untuk membuat mereka merasa didukung dan diyakinkan. Staf perlu dilatih untuk mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara, dan menawarkan bantuan yang sesuai, seperti mengarahkan korban ke tim medis atau keamanan. Selain itu, staf harus memahami pentingnya menjaga rahasia dan privasi korban untuk menghindari stigmatisasi atau trauma lebih lanjut.
3. Pelatihan harus mencakup pemahaman tentang batasan pribadi dan pentingnya menghormati ruang pribadi setiap individu. Dalam *event* besar seperti jejepangan, interaksi antara staf, relawan, dan pengunjung sangat intens. Oleh karena itu, staf perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki batasan yang berbeda-beda, dan mereka harus selalu memastikan bahwa interaksi yang dilakukan bersifat profesional dan menghormati hak-hak pengunjung. Misalnya, staf harus menghindari kontak fisik yang tidak diperlukan atau komentar yang mungkin dianggap tidak pantas, bahkan jika dimaksudkan sebagai candaan.

Dengan memiliki tim yang teredukasi, staf dan relawan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua peserta. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai sumber dukungan pertama bagi korban pelecehan seksual. Kehadiran mereka yang terlatih dan siap siaga dapat memberikan rasa aman kepada pengunjung karena mereka paham bahwa ada orang yang siap membantu jika terjadi masalah. Staf dan relawan yang terlatih juga berfungsi sebagai jembatan antara pengunjung dan pihak keamanan atau tim penanganan insiden. Mereka dapat menjadi titik kontak pertama yang menerima laporan, memberikan respons awal, dan kemudian mengkoordinasikan dengan tim keamanan atau medis untuk penanganan lebih lanjut. Hal ini memastikan bahwa insiden ditangani dengan cepat, terstruktur, dan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelatihan yang komprehensif bagi staf dan relawan adalah langkah krusial dalam memastikan keberhasilan *event* jejepangan sebagai acara yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi semua. Dengan tim yang teredukasi, panitia tidak hanya meminimalkan risiko pelecehan seksual, tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi positif di mata pengunjung. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang menunjukkan bahwa panitia peduli terhadap kesejahteraan dan keamanan semua pihak yang terlibat didalamnya.

Strategi Pencegahan Melalui Keterlibatan Pengunjung *Event* Jejepangan

Pengunjung *event* jejepangan memiliki peran strategis yang tidak kalah penting dalam mencegah pelecehan seksual di setiap acara. Melalui keterlibatan aktif mereka, pengunjung turut melengkapi peran panitia dan petugas keamanan dalam menjaga keamanan acara. Keterlibatan pengunjung tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi membangun budaya saling mendukung yang esensial dalam menghadapi dan mencegah setiap bentuk pelecehan seksual. Tindakan yang bisa diambil oleh pihak pengunjung antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan Ide "*Cosplay is Not Consent*"

"*Cosplay is Not Consent*" adalah sebuah ide atau gerakan yang bertujuan untuk mengatasi dan mencegah pelecehan seksual dalam komunitas *cosplay*. Gagasan intinya adalah bahwa mengenakan kostum, tidak peduli seberapa terbuka atau provokatifnya, tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menyentuh, melecehkan, atau membuat komentar yang tidak pantas terhadap *cosplayer*. Gerakan ini menekankan pentingnya menghormati batasan-batasan pribadi dan mendapatkan persetujuan secara eksplisit sebelum terlibat dalam interaksi fisik atau verbal dengan *cosplayer*. Dalam bentuk nyata di acara *event*, gerakan ini sudah disebarkan di berbagai *event* jejepangan di negara luar, seperti Amerika Serikat yang disebarkan melalui pemajangan spanduk oleh kerja sama antara pihak *event* dan komunitas *cosplay* yang menjadi pengunjung dari *event* tersebut.

Kehadiran gerakan ini memberikan pesan yang krusial untuk membangun pemahaman bahwa kostum yang dipilih oleh *cosplayer* hanya merupakan ekspresi kreativitas serta penghargaan terhadap karakter dan bukan ajakan untuk pelecehan. Di era digital saat ini, ide ini dapat disebarkan melalui media sosial, seperti Instagram dan Twitter yang merupakan media sosial paling terkenal digunakan oleh para pegiat *event* jejepangan, *cosplay* hingga masyarakat umum. Diharapkan melalui disebarkannya ide ini, komunitas *event* jejepangan dapat membantu merubah persepsi yang salah dan mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya menghormati batasan pribadi setiap individu.

2. Menginformasikan Sesama Komunitas akan Pelaku

Memberikan informasi bagi sesama penggiat komunitas *event* jejepangan adalah salah satu cara pengunjung untuk menghindari pelecehan seksual di *event* jejepangan. Dengan berbagi informasi yang valid dan akurat melalui *platform*, seperti grup diskusi online, forum khusus, atau media sosial yang terarah, misalnya LINE Groups, Discord, atau Telegram, komunitas dapat membangun sistem peringatan dini terhadap individu atau situasi yang berpotensi berbahaya. Selain itu, pertukaran pengalaman pribadi atau laporan insiden yang

terdokumentasi, seperti lokasi rawan, modus pelaku, atau ciri-ciri perilaku mencurigakan dapat menjadi panduan praktis bagi anggota baru maupun peserta yang belum berpengalaman.

Berbagi informasi di antara sesama penggiat komunitas *event* jejepangan adalah langkah proaktif yang tidak hanya meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga memperkuat solidaritas dan keamanan kolektif. Saling mendukung dan melindungi antar sesama komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua peserta *event*. Ini merupakan contoh nyata dalam bagaimana kekuatan suatu komunitas dapat digunakan untuk melawan pelecehan seksual dan mempromosikan nilai-nilai positif, seperti rasa empati, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab bersama.

3. Menghindari *Event* Jejepangan yang Dianggap Bermasalah

Salah satu langkah *preventif* yang bisa diambil oleh pengunjung adalah menghindari *event* jejepangan yang dikenal memiliki masalah dalam menangani isu pelecehan seksual. Ciri-ciri *event* jejepangan yang dapat dikategorisasikan dalam kategori bermasalah meliputi:

1. *Event* dengan banyak laporan pelecehan seksual yang tidak ditangani dengan serius. Beberapa *event* dikenal karena sering terjadi insiden pelecehan seksual, tetapi penyelenggara dianggap lamban atau tidak responsif dalam menangani laporan. Misalnya, jika sebuah *event* jejepangan terkenal karena sering terjadi insiden pelecehan di area *cosplay* atau ruang foto, tetapi panitia tidak mengambil tindakan tegas, seperti meningkatkan pengawasan atau memberikan pelatihan kepada staf, *event* tersebut dapat dikategorikan problematik.
2. *Event* dengan protokol keamanan yang lemah. *Event* yang tidak memiliki pos keamanan yang jelas, staf yang terlatih, atau sistem pelaporan yang mudah diakses dapat dianggap berisiko tinggi bagi calon pengunjung. Contohnya, jika sebuah *event* tidak menyediakan *hotline* atau titik pelaporan yang mudah dijangkau atau jika staf keamanan tidak terlihat di area-area ramai, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keamanan peserta.
3. *Event* yang mengabaikan *feedback* dari peserta. Beberapa *event* mungkin memiliki sejarah mengabaikan keluhan atau saran dari peserta terkait isu keamanan. Misalnya, jika peserta sebelumnya telah melaporkan insiden pelecehan atau memberikan saran untuk meningkatkan keamanan, tetapi penyelenggara tidak melakukan perubahan apapun, *event* tersebut dapat dianggap tidak peduli terhadap kesejahteraan pengunjung.
4. *Event* dengan budaya yang tidak mendukung korban. *Event* yang memiliki

budaya menyalahkan korban atau menganggap pelecehan sebagai hal yang "biasa" dalam acara semacam itu juga dapat dikategorikan sebagai problematik. Misalnya, jika panitia atau komunitas di sekitar *event* cenderung meremehkan laporan pelecehan atau bahkan menyalahkan korban karena pakaian atau perilakunya, ini menunjukkan lingkungan yang tidak aman bagi peserta.

5. *Event* dengan sejarah penanganan insiden yang buruk. Beberapa *event* mungkin pernah menjadi sorotan karena cara mereka menangani insiden pelecehan seksual yang buruk. Misalnya, jika sebuah *event* pernah viral karena korban pelecehan tidak mendapatkan dukungan yang memadai atau pelaku tidak diberi sanksi yang tegas, hal ini dapat menjadi indikator bahwa *event* tersebut tidak serius dalam menangani isu keamanan selama acara sedang berlangsung.

Sebagai pengunjung, penting untuk bersikap kritis dan proaktif dalam memilih *event* jejepangan yang dihadiri. Menghindari *event* dengan ciri-ciri problematik, seperti sejarah laporan pelecehan yang tidak ditangani, protokol keamanan yang lemah, pengabaian *feedback* peserta, budaya menyalahkan korban, atau penanganan insiden yang buruk adalah langkah *preventif* untuk melindungi diri dan mendorong perubahan positif di komunitas. Dengan memprioritaskan *event* yang transparan, responsif, dan berkomitmen pada keamanan peserta, kita tidak hanya mengurangi risiko menjadi korban pelecehan, tetapi juga mendukung upaya penyelenggara yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, kesadaran kolektif untuk memilih acara yang menghargai hak dan kenyamanan pengunjung dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi semua pecinta budaya Jepang.

4. Membangun Rasa Solidaritas Sesama Pengunjung di *Event* Jejepangan

Membangun rasa solidaritas sesama pengunjung di *event* jejepangan merupakan strategi pencegahan pelecehan seksual yang penting dan efektif. Ketika pengunjung merasa bahwa mereka bukan hanya individu yang hadir acara, tetapi bagian dari komunitas yang lebih besar, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan perilaku yang mencurigakan dan mendukung satu sama lain di saat-saat sulit. Rasa solidaritas ini juga mengurangi stigma terhadap korban, sehingga mereka merasa lebih aman untuk melaporkan insiden pelecehan tanpa takut akan dikucilkan oleh masyarakat atau sesama komunitas. Selain itu, dengan adanya keterlibatan aktif pengunjung dalam menciptakan lingkungan yang aman, mereka telah berkontribusi pada terciptanya budaya yang tidak mentolerir kasus pelecehan seksual.

Pengunjung disarankan untuk tidak pergi sendirian atau terpisah dari teman-teman mereka saat berada di *event* jejepangan, namun saran ini tidak dapat diikuti bagi mereka yang

tidak mempunyai teman atau komunitas. Apabila rasa solidaritas di *event* jejepangan sudah menguat, mereka dapat mengajak pengunjung yang datang sendiri untuk menghindari kejahatan seperti pelecehan seksual. Dengan berada dalam kelompok atau memiliki teman, mereka dapat saling melindungi dan memberikan dukungan jika terjadi situasi yang tidak nyaman. Keberadaan teman juga memudahkan pengunjung untuk berbagi pengalaman, membingkai kembali situasi sulit, dan melaporkan insiden pelecehan kepada pihak yang berwenang, sehingga menciptakan rasa aman yang kolektif di dalam lingkungan acara.

5. Memahami Tentang *Consent* dan Pelecehan Seksual

Pengunjung *event* jejepangan perlu memahami dengan baik konsep *consent* atau persetujuan dan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Pengetahuan ini sangat penting untuk membedakan antara interaksi yang sehat dan perilaku yang merugikan. Dengan memahami bahwa persetujuan harus diberikan secara jelas dan tanpa paksaan, pengunjung dapat lebih sadar akan tindakan mereka sendiri dan juga terhadap tindakan orang lain. Hal ini membantu untuk menciptakan lingkungan, dimana setiap individu akan merasa lebih aman untuk mengekspresikan diri mereka tanpa takut akan menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, pemahaman yang kuat tentang apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual akan memberdayakan pengunjung untuk mengenali tanda-tanda perilaku tidak pantas, sehingga mereka dapat bertindak dengan tepat untuk melindungi diri mereka dan teman-teman mereka.

Para pengunjung *event* jejepangan dapat mengedukasi dirinya sendiri tentang konsep *consent* atau persetujuan dan pelecehan seksual melalui beberapa langkah proaktif. Mereka dapat mengikuti kegiatan *workshop* atau seminar yang sering diselenggarakan oleh panitia *event* atau komunitas terkait yang membahas topik *consent culture* dan batasan dalam melakukan interaksi sosial. Materi ini biasanya mencakup contoh konkret, seperti cara meminta izin sebelum memeluk, berfoto, berinteraksi dengan *cosplayer*, serta penjelasan bahwa persetujuan harus dengan spesifik, secara sukarela, dan dapat ditarik kapan saja.

Pengunjung bisa memanfaatkan sumber daya *online*, seperti artikel, video edukatif, atau modul interaktif dari platform terpercaya, misalnya situs lembaga anti-kekerasan atau pemerintah untuk memahami definisi pelecehan seksual yang meliputi tindakan verbal atau komentar seksual tidak diinginkan, non-fisik atau mengikuti/menguntit, maupun fisik atau sentuhan tanpa izin. Mereka juga perlu belajar melalui diskusi dengan komunitas atau teman seputar pengalaman pribadi atau kasus yang relevan, sehingga dapat mengidentifikasi "*red flags*" perilaku merugikan. Penting bagi pengunjung untuk memahami peran sebagai *bystander* atau saksi, seperti cara menegur pelaku dengan aman atau menemani korban untuk melapor.

Melalui gabungan pengetahuan teoritis dan latihan praktis, pengunjung akan lebih siap menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai batasan privasi orang lain. Kesadaran ini harus diperkuat dengan refleksi diri, misalnya mengevaluasi apakah candaan atau pujian yang dilontarkan bisa dipersepsikan sebagai ofensif, serta komitmen untuk terus belajar dari kesalahan. Pada akhirnya, edukasi mandiri yang konsisten akan membentuk norma kolektif bahwa *event* jejepangan bukan hanya ruang ekspresi, tetapi juga ruang aman bagi semua pihak.

***Event* Jejepangan sebagai Ruang Publik Yang Aman**

Semangat dalam *event* jejepangan sebagai ruang publik yang aman sesuai dengan pemikiran Habermas sangat penting dalam konteks budaya dan interaksi sosial di masyarakat. *Event* ini tidak hanya harus terbebas dari pelecehan seksual dan isu kejahatan lainnya, tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi pengunjung untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas. Dalam kerangka pemikiran Habermas, komunikasi terbuka dan inklusif adalah kunci untuk membangun ruang publik yang efektif. Hal ini berarti bahwa semua suara, termasuk mereka yang sering terabaikan harus diberikan ruang untuk didengar dan dihargai. Lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan membuat *event* jejepangan dapat menjadi *platform* yang memfasilitasi pertukaran ide, dialog, dan kreativitas antara partisipan. Ruang yang aman berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan yang bersifat diskriminasi dan intimidasi serta memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan perspektif tanpa adanya rasa takut. Hal ini sangat penting untuk membangun komunitas yang saling menghormati dan memahami serta menyemangati keberagaman dalam ekspresi seni dan budaya *cosplay*.

Adanya pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya konsensus dan batasan, penyelenggara *event* jejepangan dapat memberdayakan pengunjung untuk terlibat dalam percakapan yang konstruktif tentang isu-isu yang relevan, seperti pelecehan seksual. Dalam ruang publik ini, setiap individu diharapkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mendorong hubungan sosial yang lebih positif dan aman. Dengan demikian, *event* jejepangan tidak hanya sekadar acara hiburan semata, tetapi juga merupakan gerbang bagi interaksi sosial yang demokratis dan inklusif dan menjadikan setiap peserta merasakan bahwa mereka memiliki tempat dan suara dalam komunitas yang lebih luas.

Penutup

Pelecehan seksual di *event* jejepangan mencerminkan fenomena sosial yang lebih luas dalam masyarakat, dimana isu ini sangat berakar dan melibatkan dinamika kekuasaan serta norma-norma yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai jenis pelecehan seksual,

seperti komentar tidak pantas, sentuhan tanpa izin, dan *stalking* dapat terjadi diantara pengunjung yang memiliki kesadaran berbeda mengenai batasan perilaku yang pantas. Penelitian ini menemukan bahwa pelecehan seksual di *event* jejepangan merupakan manifestasi dari dinamika sosial yang lebih luas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan strategi pencegahan berbasis teori Habermas dan penekanan pada kolaborasi antarpihak. Secara praktis, hasil ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan interaksi sosial di ruang publik. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya termasuk memperluas lokasi studi dan melibatkan kelompok usia yang lebih muda untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman berbeda dapat memengaruhi persepsi pelecehan seksual.

Daftar Pustaka

- Anastasya Putri, Nursanti, S., & Flori Mardiani Lubis. (2024). Eksplorasi Pengalaman Crossdressing di Komunitas *Cosplayer* Jakarta. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i1.1357>.
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>.
- Bolling, B., & Smith, M. J. (2014). *It happens at comic-con: Ethnographic essays on a pop culture phenomenon*. McFarland & Company, Inc., Publishers.
- Boyer, K. (2022). Sexual harassment and the right to everyday life. *Progress in Human Geography*, 46(2), 398-415. <https://doi.org/10.1177/03091325211024340>.
- Calhoun, C. J. (1992). *Habermas and the public sphere*. MIT Press.
- Carolina, N., Saputra, W. A., Nafi'ah, H. H., Merkuri, Y. G., & Bakti, C. P. (2022b). Strategi intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan seksual: Isu Dan Tren. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7098>.
- Ceccato, V., & Nalla, M. (Eds.). (2020). *Crime and Fear in Public Places: Towards Safe, Inclusive and Sustainable Cities (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429352775>.
- Creswell, John W., Creswell, J. David. (2023). *Research Design : Qualitative, Quantitative,*

And Mixed Method Approaches (6th ed.). California: SAGE Publications.

Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ellsworth, Alexandria, (2018) "I'm Not Your Waifu: Sexual Harassment and Assault in Cosplay, Anime & Comic Conventions". *Electronic Theses and Dissertations*. 5945. <https://stars.library.ucf.edu/etd/5945>.

Fatwati, G., & Rinawati, R. (2021). Perempuan dan Kekerasan Seksual dalam Kampanye Komunitas Samahita.

Hasibuan, Kalijunjung & Pahrijal, Rival & Supriandi, Supriandi. (2023). Analisis Tantangan Dalam Menghadapi Pelecehan Seksual Terhadap Generasi Millennial dan Gen Z. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2. 931-941. 10.58812/jhhws.v2i10.706.

Jenkins, B. (2020). Marginalization within Nerd Culture: Racism and Sexism within *Cosplay*. *The Popular Culture Studies Journal*, 7(2), 157-170.

Kearl, H. (2010). *Stop Street Harassment: Making Public Places Safe and Welcoming for Women*. Santa Barbara: Praeger. <http://dx.doi.org/10.5040/9798216019114>

- Khoirunnisa, Usep Dayat, & Kariena Febriantini. (2022). Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal. *NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9, No 5 (2022), 1517-1522. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1517-1522>
- Komariah, S. (2023). *Pengantar Sosiologi Gender*. Jakarta: Eureka Media Aksara.
- Lome, J.K. (2016). The creative empowerment of body positivity in the *cosplay* community. *Transformative Works and Cultures*, 22.
- Lucas, Christopher M., ""This Isn't for You, This Is for Me": Women in *Cosplay* and Their Experiences Combatting Harassment and Stigma" (2018). *Theses, Dissertations and Capstones*. 1145. <https://mds.marshall.edu/etd/1145>
- Mishou, A. Luzz. (2021). *Cosplayers : Gender And Identity*. Abingdon, Oxon ; New York, NY:Routledge, Taylor & Francis Group,
- Mountfort, P., Peirson-Smith, A., & Geczy, A. (2019). *Planet Cosplay*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv36xvxb4>
- Muzdaliva, D. W. P., Kholifah, S., & Rahmawati, I. (2021). Gender Identity and *Cosplayer* Stigmation In Malang City. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 24(3).
- Saragi, M. P., Khotimah, K., Mawaddah, M., Sahputra, D., & Daulay, A. A. (2023). Pemulihan trauma: Strategi Pemulihan trauma Korban Pelecehan seksual. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 746. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3134>
- Smith, M. (2024). *Sexual Harassment: A Reference Handbook*. Bloomsbury Academic.
- Susanti, V., Cucu Nurhayati, Nurhayati, C., Rosyidah, I., & Lebrine Sahetapy, E. (2024). Dynamics of Culture and Media Power: Analysis of Misogyny in Online News in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 5(2), 168–179. <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.43702>.
- Tompkins, Jessica. (2019). Is gender just a costume? An exploratory study of crossplay. *Transformative Works and Cultures*. 30. [10.3983/twc.2019.1459](https://doi.org/10.3983/twc.2019.1459).
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- Victoria, Lemmons., ""*Cosplaying* with gender: Freedoms and limitations to gender exploration at Canadian anime conventions" (2019). *Theses and Dissertation*. <https://mds.marshall.edu/etd/1145>
- Wijaya, A., & Ananta, W. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.
- Winge, T. (2018). *Costuming Cosplay: Dressing the Imagination*. Bloomsbury Publishing.